

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah era reformasi 1998. Pergejolakan yang terjadi pada masa itu dengan mahasiswa sebagai pelopornya berhasil membuat perubahan yang sangat besar hampir di segala aspek<sup>1</sup>. Salah satunya adalah kemajuan dalam partai politik, kebebasan berekspresi untuk setiap warga negara, serta gagasan bahwa rakyat adalah faktor yang turut andil dalam dunia perpolitikan. Runtuhnya orde baru tidak hanya memicu hasrat tokoh, agamawan, pengusaha, dan kalangan intelektual untuk bangkit menggapai kekuasaan melalui partai politik.

Salah satunya adalah kemajuan dalam partai politik, kebebasan berekspresi untuk setiap warga negara, serta gagasan bahwa rakyat adalah faktor yang turut andil dalam dunia perpolitikan. Runtuhnya orde baru tidak hanya memicu hasrat tokoh, agamawan, pengusaha, dan kalangan intelektual untuk bangkit menggapai kekuasaan melalui partai politik.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Khoirudin, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia*, 2004,

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik berfungsi, salah satunya sebagai sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan bernegara dan memperjuangkan kepentingan dihadapan publik. Sebagai bagian dari infrastruktur politik, partai politik menjalankan berbagai fungsi, termasuk rekrutmen politik. Kaderisasi adalah pendidikan jangka panjang dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu pada seorang kader. Kader merupakan ujung tombak dalam sistem regenerasi organisasi. Kader harus memahami dan meyakini nilai-nilai yang dianut bersama, yang menjadi dasar pembentukan karakter dan identitas organisasi. Setiap organisasi, termasuk partai politik, memerlukan proses kaderisasi yang kuat untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan partai politik.<sup>2</sup>

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam menghubungkan proses pemerintahan dengan masyarakat. Salah satu aspek pentingnya adalah dalam rekrutmen jabatan politik. Perubahan UUD 1945 antara tahun 1999 hingga 2002 menetapkan bahwa setiap proses rekrutmen untuk jabatan politik di pemerintahan (eksekutif), perwakilan (legislatif), dan peradilan (yudikatif), baik di tingkat nasional maupun daerah, harus melalui partai politik. Amanat konstitusi ini menegaskan pentingnya peran dan eksistensi partai politik dalam proses pengisian jabatan-jabatan kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis.

Partisipasi politik merupakan daya tampung dalam prinsip kelompok ideologis untuk menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dan negara dalam konteks representasi publik. Melalui rekrutmen politik, partai politik

---

<sup>2</sup> Merdeka, "Fungsi Partai Politik Dalam Pemerintahan, Mewakili Kepentingan Hingga Membuat Aturan," 2022, <https://www.merdeka.com/jateng/fungsi-partai-politik-dalam-pemerintahan-mewakili-kepentingan-hingga-membuat-aturan-kln.html?page=8>.

dapat mendukung seseorang yang ingin menduduki posisi pemerintahan, baik sebagai legislatif dan eksekutif. Sehingga tujuan utama sistem pemerintahan demokrasi dapat tercapai dengan baik. Kelompok ideologis juga mampu untuk mengarahkan kader muda sebagai penerus kader-kader lama. Rekrutmen politik diatur pada Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam mengisi jabatan politik melalui mekanisme yang mempertimbangkan keseragaman, orientasi dan kesetaraan.<sup>3</sup>

Dalam proses rekrutmen, transfer keterampilan dan keahlian berpolitik juga dapat dilakukan. Maka dari itu, peningkatan kualitas kepemimpinan akan menghasilkan pemimpin baru yang mampu memajukan organisasi ke arah yang lebih baik.<sup>4</sup> Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan rekrutmen dengan sistem yang transparan, memberi kesempatan kepada semua kader berpotensi, dan mendorong persaingan sehat dan terbuka di dalam partai. Penting bagi kader dan calon pemimpin harus untuk terbiasa dengan sistem persaingan yang adil dan transparan. Tanpa adanya praktik kolusi dan nepotisme, kaderisasi dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 29 ayat 2, “proses rekrutmen partai politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta perundang-undangan yang berlaku”.

Sejak era reformasi dan pemilu pertama setelah reformasi, peristiwa perubahan partai di Indonesia yang diprakasai oleh elit partai atau anggota

---

<sup>3</sup> Siti Muslimah, “Implementasi Fungsi Partai Politik Pada Partai Golongan Karya Kota Banjarmasin Tahun 2020,” 2020.

legislatif mulai marak. Pada masa itu, terjadi fenomena di mana elit partai dari era Orde Baru mendirikan partai politik baru dan menduduki posisi puncak dalam struktur partai politik. Setelah pemilu 2004, terjadi peningkatan signifikan dalam fenomena perpindahan antar partai, baik oleh elit partai kecil yang tidak berhasil masuk parlemen maupun oleh elit partai yang sudah menjadi legislator. Fenomena ini terus berlanjut hingga sekarang. Meskipun tidak ada larangan hukum terhadap perpindahan partai, perilaku para elit politik ini berpotensi merusak tatanan politik Indonesia. Perpindahan partai menimbulkan pertanyaan tentang loyalitas dan ideologi politik mereka, serta mengganggu proses kaderisasi dalam partai yang menerima politisi tersebut. Kader-kader yang sudah disiapkan dalam partai dapat kehilangan peluangnya untuk maju karena kedatangan politisi baru yang mungkin lebih populer.<sup>4</sup>

Apabila seluruh kader PKB menyadari tujuan, target, rencana dan cita-cita besar PKB membangun bangsa dan negara ini, dia optimis ideologi dan loyalitas mereka bakal menjadi kekuatan PKB. Imbasnya kecintaan mereka kepada PKB tidak palsu dan tidak transaksional. Oleh karena itu, kaderisasi yang sedang gencar dilakukan PKB dengan berbagai persiapan, baik dari sisi instruktur tingkat nasional maupun daerah, materi dan juga modul-modul kaderisasi, merupakan salah satu strategi mengukuhkan ideologi dan loyalitas. Salah satu yang harus di persiapkan adalah ideologi partai yang kokoh. Kalau semua kader, pengurus dan kekuatan PKB komitmen terhadap ideologi, loyal kepada cita-cita, nilai juang dan moralitas yang dibangun para pendiri PKB, maka pragmatisme politik bisa

---

<sup>4</sup> Andi Ali Armunanto, "PERPINDAHAN PARTAI DAN EFEKNYA TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN Party Switching and the Effect on Political Party System" 2, no. 1 (2016): 2407–9138.

dihindarkan.

Sebagai sebuah partai kader, PKB memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang terstruktur dan metodis. Sistem kaderisasi ini bertujuan untuk merekrut calon anggota dan juga memberikan pembinaan kepada seluruh anggota, kader, dan fungsionaris partai. Dalam konteks militansi, terdapat kesesuaian antara teori dengan temuan yang ada di lapangan. PKB, sebagai partai kader, memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang terorganisir secara sistematis dan terencana. Kaderisasi ini bertujuan untuk merekrut calon anggota dan memberikan pembinaan kepada seluruh anggota, kader, dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan melalui infrastruktur kelembagaan partai yang tersebar mulai dari tingkat pusat hingga tingkat ranting.<sup>5</sup>

Sumber daya terpenting dalam dunia politik adalah sumber daya manusia, karena partai politik digerakan oleh manusia. Oleh karena itu, tantangan utama dalam menjalankan manajemen organisasi partai politik terletak pada bagaimana partai politik melakukan rekrutmen yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi. Proses mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas harus dimulai dari sistem rekrutmen yang baik, dengan fokus pada prekrutan orang-orang yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Selain itu, persaingan dengan partai politik lain juga tidak dapat dihindari dalam menarik individu-individu berpotensi yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.

Kader adalah anggota inti yang menjadi bagian terpilih, dalam lingkup dan lingkungan pimpinan serta mendampingi di sekitar kepemimpinan. Kader bisa

---

<sup>5</sup> Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi Dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer* (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2004).

berarti pula sebagai jantung suatu organisasi. Jika kader dalam suatu kepemimpinan lemah, maka seluruh kekuatan kepemimpinan juga akan lemah. Kader berarti pula pasukan inti. Daya juang pasukan inti ini sangat tergantung dari nilai kadernya yang berkualitas, berwawasan, militan, dan penuh semangat. Kader seperti persegi panjang atau kerangka. Dengan demikian kader dapat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terbaik karena terpilih, yaitu merupakan tulang punggung (kerangka) dari kelompok yang lebih besar dan terorganisasi secara permanen. Jadi, jelas bahwa orang-orang yang berkualitas itulah yang terpilih dan berpengalaman dalam berorganisasi, taat asas dan berinisiatif, yang dapat disebut sebagai kader.

Setiap kali keputusan diambil oleh partai menjelang pemilihan umum. Hal tersebut menjadi bukti dari eksistensi mereka sebagai bagian integral dari proses demokrasi. Sebelum tahapan pemilu dimulai, partai politik telah memasang ancang-ancang dengan membuka penjangkaran calon, baik dari internal maupun luar partai sebagai persiapan untuk mencari kandidat yang tepat untuk diusung dalam pemilihan tersebut. Ini merupakan salah satu mekanisme penting dalam proses politik yang menentukan arah dan pilihan pemilih dalam sebuah negara demokratis.

Di Provinsi Jambi, terdapat fenomena menarik terjadi dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jambi pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020. Pada pemilihan tersebut, hanya satu calon Gubernur yang mendapat dukungan dari partai politik yang menaunginya, yaitu Cek Endra, ketua umum DPD I Partai Golkar Jambi. Cek Endra, yang merupakan Bupati Sarolangun, mendapat

dukungan penuh dari Partai Golkar yang memiliki 7 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Selain itu, PDIP juga memberikan dukungan kepada Cek Endra setelah menjadi partai pemenang dalam Pemilu 2019. PDIP, yang memiliki 9 kursi di DPRD Jambi, mendukung Cek Endra dengan menempatkan calon wakil gubernur, yaitu Ratu Munawaroh, istri mendiang Zulkifli Nurdin, mantan Gubernur Jambi dua periode yang berhasil membesarkan Partai Amanat Nasional di Jambi.

Namun, Ratu Munawaroh kemudian bergabung dengan PDIP karena tidak adanya kepastian dukungan dari PAN yang awalnya diharapkan. Sebelum PDIP secara resmi menyatakan dukungan, dua kader murni PDIP, yaitu Abdullah Sani dan Syafrial (Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat), telah mendeklarasikan diri sebagai calon wakil gubernur. Abdullah Sani awalnya mendeklarasikan diri mendampingi Al Haris, kader Partai Golkar yang merupakan Bupati Kabupaten Merangin. Namun, menjelang masa pendaftaran ke KPU, PAN, yang memiliki tujuh kursi di DPRD Jambi, menyatakan dukungan kepada Haris-Sani, sementara dukungan dari Partai Berkarya dibatalkan karena kemelut internal. Akibatnya, Abdullah Sani menyatakan mundur dari PDIP dan bergabung dengan PKB, sedangkan Al Haris mundur dari Partai Golkar dan bergabung dengan PAN.<sup>6</sup>

Seperti yang ditegaskan oleh pakar politik Ramlan Surbakti, rekrutmen politik mencakup serangkaian proses seperti pemilihan, seleksi, dan penunjukan seseorang atau sekelompok orang untuk mengemban peran-peran dalam sistem politik secara umum, dan pemerintahan secara khusus. Setiap partai politik memiliki metode dan prosedur tersendiri dalam melaksanakan rekrutmen politik.

---

<sup>6</sup> Solmi, "Drama Pilgub Jambi 2020, Ditinggal Dan Meninggalkan Partai," 2020.

Selain itu, proses rekrutmen juga merupakan fungsi untuk mencari dan mengajak individu-individu yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, yang biasanya melibatkan proses penjangkaran yang beragam.<sup>7</sup>

Partai politik sering mengandalkan survei untuk menentukan pasangan calon, dengan fokus pada popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Hal ini menyebabkan hanya calon dengan popularitas yang tinggi saja yang diutamakan oleh partai dalam penentuan pasangan calon. Selain itu, hilangnya aturan yang menghambat peluang munculnya dinasti politik dalam regulasi juga meningkatkan eksklusivitas dari sirkulasi elit politik lokal.<sup>8</sup>

PKB merupakan salah satu partai besar dan memiliki massa yang cukup banyak, salah satu contohnya di tingkat Provinsi Jambi. PKB memperoleh 172.657 suara (sumber KPU Provinsi Jambi), serta memperoleh 6 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pemilihan legislatif 2024. PKB memperoleh 6 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pemilihan legislatif 2024 yang artinya PKB memperoleh 1 kursi pada setiap dapil di Provinsi Jambi.

---

<sup>7</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. GrasIndo, 1992).

<sup>8</sup> Mochamad Farisi, "Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Instrumen Sirkulasi Elit Politik Lokal," *Jurnal Magister Ilmu Politik Unhas* 2, no. 2 (2016).



Tabel 1.1  
Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilihan Umum Legislatif  
Provinsi Jambi Tahun 2024

| NOMOR DAN<br>NAMA PARTAI<br>POLITIK<br>PESERTA PEMILU |                                   | RINCIAN             |                     |                     |                     |                     |                     | JUMLAH<br>AKHIR |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                                       |                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |                 |
|                                                       |                                   | DAPIL 1<br>PROVINSI | DAPIL 1<br>PROVINSI | DAPIL 1<br>PROVINSI | DAPIL 1<br>PROVINSI | DAPIL 1<br>PROVINSI | DAPIL 1<br>PROVINSI |                 |
| (1)                                                   |                                   | (2)                 | (3)                 | (4)                 | (5)                 | (6)                 | (7)                 | (8)             |
| A.                                                    | Partai Nasional                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
|                                                       | Partai Kebangkitan Bangsa         | 25.550              | 30.963              | 33.240              | 22.544              | 36.453              | 23.907              | 172.657         |
|                                                       | Partai Gerindra                   | 43.872              | 41.118              | 44.246              | 23.730              | 39.424              | 36.604              | 228.994         |
|                                                       | PDI Perjuangan                    | 28.215              | 57.580              | 55.026              | 40.530              | 48.621              | 32.781              | 262.753         |
|                                                       | Partai Golkar                     | 42.145              | 51.345              | 34.528              | 18.009              | 67.899              | 40.150              | 254.076         |
|                                                       | Partai NasDem                     | 40.325              | 25.555              | 21.676              | 12.956              | 28.171              | 20.189              | 148.872         |
|                                                       | Partai Buruh                      | 1.673               | 1.790               | 1.708               | 362                 | 1.821               | 2.612               | 9.966           |
|                                                       | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 2.584               | 2.182               | 2.270               | 1.173               | 4.706               | 1.725               | 14.640          |
|                                                       | Partai Keadilan Sejahtera         | 35.099              | 19.245              | 26.611              | 12.778              | 28.233              | 17.344              | 139.310         |
|                                                       | Partai Kebangkitan Nusantara      | 935                 | 1.227               | 12.258              | 3.162               | 1.657               | 712                 | 19.951          |
|                                                       | Partai Hati Nurani Rakyat         | 795                 | 1.196               | 2.817               | 331                 | 1.503               | 1.261               | 7.903           |
|                                                       | Partai Garda Republik Indonesia   | 915                 | 478                 | 647                 | 108                 | 466                 | 418                 | 3.032           |
|                                                       | Partai Amanat Nasional            | 48.696              | 66.558              | 37.242              | 52.198              | 36.455              | 87.508              | 328.657         |
|                                                       | Partai Bulan Bintang              | 2.212               | 1.239               | 1.039               | 60                  | 370                 | 796                 | 5.716           |
|                                                       | Partai Demokrat                   | 21.292              | 28.176              | 51.478              | 19.513              | 54.996              | 15.139              | 190.594         |

|    |                                                        |         |         |         |         |         |         |           |
|----|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|    | Partai Solidaritas Indonesia                           | 10.212  | 4.216   | 1.320   | 488     | 3.655   | 3.174   | 23.065    |
|    | Partai PERINDO                                         | 11.452  | 4.106   | 2.853   | 750     | 5.274   | 3.455   | 27.890    |
|    | Partai Persatuan Pembangunan                           | 17.093  | 51.572  | 55.269  | 6.090   | 30.157  | 15.187  | 175.368   |
|    | Partai Ummat                                           | 1.668   | 1.093   | 275     | 1.084   | 4.488   | 1.469   | 10.077    |
| B. | Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu | 334.733 | 389.639 | 384.503 | 215.866 | 394.349 | 304.349 | 2.023.521 |

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2024*

Oleh karena itu, sistem rekrutmen politik memiliki peran penting dalam sistem politik suatu negara. Proses ini menentukan orang-orang yang akan mengemban fungsi-fungsi dalam lembaga-lembaga politik negara tersebut. Keberhasilan suatu sistem politik dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada kualitas kaderisasi politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dinilai dari kemampuannya dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Salah satu fungsi terpenting dari partai politik adalah fungsi rekrutmen.

Penelitian sebelumnya yang sejalan dengan konteks penelitian ini dilakukan oleh Yuni Femelia pada tahun 2017 dengan judul "Pola Pengkaderan PKB Dalam Meningkatkan Kualitas Berpolitik (Studi Pada DPC PKB Kota Bandar Lampung)". Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai pola pengkaderan PKB dalam merekrut kader-kader mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pola pengkaderan DPC PKB Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kualitas

berpolitik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang mengumpulkan data langsung dari lapangan. Metode yang digunakan adalah wawancara dan analisis dokumen secara teliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PKB memiliki tiga tahapan pola dalam merekrut kader-kader mereka. Tahapan pertama adalah tingkat dasar di mana para kader harus memahami arti berorganisasi, menanamkan loyalitas, dan memantapkan dedikasi. Tahapan kedua adalah tingkat menengah yang melibatkan pembukaan wawasan berpikir berdasarkan ideologi partai, meningkatkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi, serta meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. Tahapan terakhir adalah tingkat lanjut di mana kader diharapkan memiliki kemampuan konseptual, berpikir sistematis dan strategis, serta kemampuan menganalisis peristiwa politik dan berpikir futuristik. Melalui tahapan-tahapan ini, diharapkan PKB dapat merekrut kader-kader berkualitas yang dapat membawa partai menuju kemajuan. Kader dianggap sebagai ujung tombak partai yang membawa visi dan misi partai untuk tercapai dengan baik.<sup>9</sup>

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Surya Hidayat Bokings pada tahun 2018 berjudul "Implementasi Pola Rekrutmen Politik dalam Perspektif Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik". Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang melakukan telaah dengan berpedoman pada asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyoroti turbulensi dalam pengambilan keputusan dalam sistem rekrutmen politik oleh partai politik, serta

---

<sup>9</sup> Yuni Femelia, "Pola Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Meningkatkan Kualitas Berpolitik" (Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

kelemahan UU Partai Politik yang memberikan keleluasaan kepada pengurus pusat untuk menganulir keputusan pengurus daerah. Peran pengurus pusat yang memiliki kewenangan untuk mengabaikan keputusan pengurus daerah menyebabkan ketidakselarasan antara pengurus pusat dan pengurus daerah, serta mengakibatkan kesentralisasi keputusan dalam partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada ketidaksiapan partai politik dalam memberikan wewenang kepada pengurus daerah dalam proses rekrutmen politik, khususnya dalam menentukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, perlunya pembaharuan pada UU Partai Politik untuk memperkuat peran pengurus daerah dalam pengambilan keputusan rekrutmen politik, terutama terkait penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, partai politik dapat menjaga kesatuan dan keutuhan partai serta meningkatkan partisipasi pengurus daerah dalam proses politik partai.<sup>10</sup>

Perbedaan antara penelitian tersebut terletak pada fokus dan ruang lingkupnya. Penelitian terdahulu mempelajari pola pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara spesifik dalam meningkatkan kualitas berpolitik. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan akan memfokuskan pada strategi dalam fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik khususnya pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Provinsi Jambi. Dengan demikian, penelitian ini akan lebih terfokus pada pengaplikasian konkret dari strategi dan fungsi rekrutmen politik dalam konteks partai politik lokal dan situasi politik yang spesifik di Provinsi Jambi.

---

<sup>10</sup> Surya Hidayat Bongkis, "Implementasi Pola Rekrutmen Politik Dalam Perspektif Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik" (Universitas Negri Gorontalo, 2018).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul ***“Analisis Proses Rekrutmen Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jambi pada Pemilihan Umum Calon Legislatif Provinsi Tahun 2024”***

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jambi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jambi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, akademisi dan peneliti lainnya. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran

ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian mengarah pada analisis strategi partai kebangkitan bangsa provinsi jambi dalam fungsi rekrutmen pada pemilihan umum legislatif 2024.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pihak-pihak terkait dalam rekrutmen politik di Jambi dan bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan acuan bagi ingin melakukan penelitian pada permasalahan sama.

## 1.5 Landasan Teori

### 1.5.1 Partai Politik

Partai politik adalah sebuah entitas terstruktur yang anggotanya memiliki keselarasan dalam orientasi, nilai-nilai, dan aspirasi. Kelompok ini bertujuan untuk meraih kekuasaan politik serta memperebutkan posisi politik, umumnya melalui jalur konstitusional guna mewujudkan agenda-agenda programnya.<sup>11</sup>

Partai politik merupakan elemen krusial dalam dinamika politik dan tatanan pemerintahan. Mereka berperan sebagai penghubung antara masyarakat sipil dengan negara dan institusi-institusinya. Selain itu, partai juga menjadi wadah untuk menyuarakan beragam pandangan dan kepentingan dari berbagai

---

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 403-404.

segmen masyarakat. Seiring dengan perkembangan demokrasi di berbagai negara di seluruh dunia, peran partai politik semakin terlihat signifikan.<sup>12</sup>

Partai politik menggunakan pemilihan umum sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, partai politik umumnya melakukan tiga langkah. Pertama, mereka melakukan seleksi terhadap calon-calon yang akan diusung. Setelah calon-calon tersebut terpilih, partai melakukan kampanye untuk mendukung mereka. Setelah pemilihan umum dilaksanakan dan calon-calon terpilih, partai politik kemudian mengambil peran dalam fungsi pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif.<sup>13</sup>

Miriam Budiardjo menjelaskan secara lebih rinci tentang fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen. Fungsi ini sangat terkait dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik pada tingkat internal partai maupun pada tingkat nasional yang lebih luas. Secara internal, setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas. Hal ini karena hanya dengan memiliki kader-kader yang berkualitas, partai memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan maju.<sup>14</sup>

### 1.5.2 Rekrutmen Politik

Pada masa Orde Baru di Indonesia, pola rekrutmen politik dilakukan secara semi-terbuka. Proses ini tercermin dari peran dominan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dalam melakukan tugas rekrutmen politik. Meskipun partai politik sudah memiliki kader yang disiapkan, namun LPU memiliki kewenangan untuk

---

<sup>12</sup> Budiardjo, hlm. 397.

<sup>13</sup> Muhadam Labolo and Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 15.

<sup>14</sup> Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 405.

menolak kader-kader tersebut untuk ditempatkan pada jabatan-jabatan tertentu, jika dianggap bertentangan dengan ideologi pemerintah atau berasal dari organisasi yang dianggap ilegal pada masa tersebut. Dengan kata lain, kriteria rekrutmen politik pada masa itu lebih ditentukan oleh sejauh mana kesediaan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan kemampuan untuk memenuhi keinginan pemerintah pada waktu itu.

Rekrutmen politik dapat didefinisikan sebagai proses penyeleksian individu atau kelompok orang yang akan menjabat dalam fungsi-fungsi politik suatu negara melalui berbagai lembaga politik yang ada. Kualitas rekrutmen politik tercermin dari pola dan mekanisme yang digunakan dalam proses seleksi tersebut. Adapun tiga pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam sebuah proses rekrutmen politik yaitu :

- a) Indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam masyarakat.
- b) Pola-pola rekrutmen politik menjadi bahan refleksi bagi masyarakat.
- c) Pola-pola rekrutmen politik menjadi indikator penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam masyarakat

Dalam implementasinya, rekrutmen politik menjadi sebuah proses dengan kegandaan makna. Pertama, melibatkan seleksi individu untuk menduduki posisi-posisi politik yang ada. Kedua, melibatkan transformasi peran-peran non-politik warga dari berbagai latar belakang budaya agar mampu berperan dalam politik.



Sifat dari rekrutmen politik juga dua arah, di mana ada kesamaan kesempatan yang dimiliki individu yang masuk dalam dunia politik untuk mendapatkan jabatan dalam struktur politik. Rekrutmen politik dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni dengan formal lewat seleksi yang diadakan lembaga partai politik, atau secara informal dengan mekanisme "orang dalam" tanpa seleksi, dengan pertimbangan yang cermat apakah seseorang cocok untuk terlibat dalam politik atau tidak.<sup>15</sup>

Rekrutmen politik merupakan proses seleksi dan pemilihan individu atau sekelompok orang untuk menjalankan peran-peran dalam sistem politik secara umum, terutama dalam pemerintahan. Fungsi rekrutmen politik semakin signifikan tergantung pada kedudukan partai politik tersebut dalam sistem politik suatu negara. Misalnya, dalam sistem politik totaliter di mana terdapat satu partai tunggal, atau dalam sistem politik demokrasi di mana partai politik mayoritas memiliki kekuasaan untuk membentuk pemerintahan.<sup>16</sup>

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam proses rekrutmen politik. Hal ini ditunjukkan dengan upaya partai untuk mempersiapkan kader yang diperlukan untuk mengisi kedudukan politik. Partai politik menjadi wadah utama untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tanggung jawab partai politik adalah membentuk kader-kader politik yang mampu menjalankan sistem politik negara secara efektif.<sup>17</sup>

Partai politik mengadakan perbedaan yang jelas antara "kader partai

---

<sup>15</sup> Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, ed. Risman Sikumbang (Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.).

<sup>16</sup> Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hlm. 150.

<sup>17</sup> Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

politik" dan "anggota partai politik". Anggota partai politik merujuk pada seluruh individu yang secara administratif terdata sebagai anggota partai, baik yang berstatus aktif ataupun tidak. Di sisi lain, kader partai politik merupakan anggota yang telah diseleksi partai, biasanya berdasarkan kontribusi dan keterlibatannya dalam kegiatan serta tugas-tugas partai politik. Maka dari itu, kader partai politik adalah anggota partai, tetapi tidak semua anggota partai bisa disebut sebagai kader partai politik.

Untuk memastikan bahwa kader politik yang direkrut berkualitas prima, ada serangkaian langkah-langkah yang perlu partai politik ikuti.. *Pertama*, mengadakan seleksi yang ketat terhadap calon kader. *Kedua*, mengadakan program pendidikan dan pelatihan dasar bagi kader yang terpilih. *Ketiga*, memberikan penugasan awal kepada kader untuk mengasah pengalaman praktis di lapangan. *Keempat*, menyediakan pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi kader yang telah memenuhi persyaratan. *Kelima*, mendorong kader untuk menjadi pelopor dalam melindungi kepentingan partai politik. Terakhir, mengikutsertakan kader dalam diskusi dan seminar untuk mengevaluasi kemampuan mereka dalam memecahkan masalah.<sup>18</sup>

Umumnya ada beberapa cara dalam melakukan rekrutmen politik, yaitu :

a. Sistem Rekrutmen Politik Terbuka

Sistem rekrutmen terbuka mengacu pada prinsip bahwa setiap warga negara yang mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, serta memiliki bakat yang diperlukan, berkesempatan untuk untuk memegang

---

<sup>18</sup> Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah : Desentralisasi Dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda Dan Anggota DPRD* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).

jabatan politik atau pemerintahan. Keuntungan dari sistem ini adalah penerimaan terhadap pluralisme, non-sektarianisme, non-diskriminasi, dan inklusivitas. Namun, kelemahannya adalah penekanan lebih pada kuantitas daripada kualitas, serta peningkatan jumlah anggota yang relatif besar.

b. Sistem Rekrutmen Politik Tertutup

Sebaliknya, sistem rekrutmen tertutup hanya memberikan peluang kepada kelompok-kelompok tertentu seperti teman dekat, pengusaha, atau individu dengan kesamaan agama, daerah, etnis, bahkan hubungan keluarga dengan pihak berkuasa. Rekrutmen tertutup memiliki kelebihan dalam hal jumlah anggota yang relatif terbatas, pemilihan secara kooptasi, dan penekanan pada kualitas. Namun, kelemahannya adalah tidak menerima pluralisme, bersifat sektarian, diskriminatif, eksklusif, serta cenderung mengalami krisis kader.

c. Seleksi

Seleksi merujuk pada proses untuk memilih individu sebagai kandidat calon dan menempatkannya di posisi yang diperlukan organisasi. Artinya, seleksi merupakan proses penyelarasan antara kebutuhan dan persyaratan organisasi dengan keterampilan dan kualifikasi individu. Dalam konteks rekrutmen politik, proses seleksi melalui beberapa tahapan, termasuk pendaftaran, penjaringan, penyaringan, dan penetapan calon legislatif.<sup>19</sup>

d. Promosi

---

<sup>19</sup> Adrian Lopak and Frets A Goraph, "Mekanisme Rekrutmen Partai Politik Dalam Penetapan Calon," 2014.

Pada dasarnya, strategi promosi calon didasarkan pada konsep pemasaran politik. Konsep pemasaran politik adalah upaya promosi yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan kandidat atau partai politik dengan mengintegrasikan berbagai aktivitas politik, seperti kampanye program pembangunan ekonomi atau kegiatan sosial.

Jika partai gagal menjalankan fungsi rekrutmen politik, maka ia dapat kehilangan legitimasi dan akhirnya tidak dapat berfungsi sebagai partai politik. Rekrutmen politik merupakan proses untuk menarik individu-individu untuk terlibat dalam kegiatan politik dan mempertimbangkan pencalonan mereka untuk jabatan pemerintahan. Proses ini dapat melibatkan penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi politik, atau mencalonkan diri untuk berbagai jabatan politik tertentu.

Rekrutmen politik mencakup pola-pola tertentu dalam konsepnya. Dengan mempelajari pola-pola tersebut, kita akan menyadari bahwa ada keterkaitan dengan sistem nilai, perbedaan derajat, serta basis dan stratifikasi sosial. Ini berarti bahwa proses rekrutmen politik dapat menciptakan perbedaan-perbedaan yang signifikan di antara masyarakat dalam berbagai tingkatan peran sosial mereka.

Koalisi juga dibangun dengan tujuan utama untuk mengamankan kandidat yang diusung. Dengan berkolaborasi bersama berbagai partai politik, diharapkan dukungan terhadap calon akan semakin besar. Melalui kerja sama dengan berbagai partai, harapannya adalah dapat menggandakan sumber daya dukungan terhadap calon tersebut. Dengan keterlibatan banyak partai dalam mendukung

calon, diharapkan massa pendukung dari masing-masing partai juga akan turut mendukung calon yang diusung. Proses pemilihan Kepala Daerah, yang merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi melalui pemilu, memberikan mandat kepada partai politik untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam konteks rekrutmen, partai politik telah mengacu pada undang-undang yang berlaku. Partai politik memiliki peran penting dalam upaya menghasilkan calon pemimpin daerah yang memiliki integritas dan mampu menjalankan mandat rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Namun, masih terlihat bahwa proses ini belum sepenuhnya mencerminkan tekad dalam merekrut kader politik yang berkualitas, berdedikasi, serta memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi. Akibatnya, beberapa pemimpin partai cenderung tidak memberikan dukungan penuh kepada kader partainya sendiri, dan lebih memilih mencari figur di luar partai yang memiliki potensi kemenangan yang lebih tinggi, meskipun harus didatangkan dari luar partai, dengan alasan untuk memastikan kemenangan.

### **1.5.3 Konsolidasi Politik**

Konsolidasi merupakan proses penguatan kinerja suatu organisasi atau lembaga guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks politik, istilah ini sering merujuk pada konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi mengacu pada proses mengintegrasikan berbagai elemen demokrasi secara bersama-sama untuk mencapai kemajuan dalam demokratisasi politik.

Keberadaan partai politik memiliki peran yang signifikan dalam proses konsolidasi demokrasi. Ini tidak terlepas dari pengaruh dan peran elit politik, khususnya di tingkat pusat, dalam mengarahkan arus politik. Partai politik memainkan peran krusial dalam mengonsolidasikan dan mengartikulasikan beragam kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Budiatri, peran elit politik dalam partai politik menjadi kunci utama dalam proses konsolidasi partai politik.

Noor berpendapat bahwa konsolidasi yang ada di partai politik dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni konsolidasi eksternal dan konsolidasi internal. Konsolidasi eksternal merujuk pada upaya konsolidasi yang melibatkan dimensi vertikal dan horizontal. Sebaliknya, konsolidasi internal mengacu pada penyatuan struktur dan agenda politik partai di dalam lingkup internalnya. Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada lokasi pelaksanaannya; konsolidasi eksternal berlangsung di luar partai atau masyarakat, sementara konsolidasi internal terjadi di dalam partai itu sendiri. Di samping itu, partai politik diharapkan untuk memainkan peran aktif dalam konsolidasi eksternal dan internal dengan seimbang, mengingat partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi.<sup>20</sup>

#### a. Konsolidasi Eksternal

Konsolidasi eksternal adalah salah satu cara di mana partai politik melakukan upaya penyatuan di luar cakupan internal partai. Biasanya, jenis konsolidasi ini terjadi pada momen khusus seperti kontestasi dalam

---

<sup>20</sup> Muh. Nur Royyan, Tunjung Sulaksono, and Junior Hendri Wijaya, "Konsolidasi Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemenangan Pilkada Pasca Konflik Internal Partai," *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 4, no. 1 (December 30, 2022), <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i1.18445>.

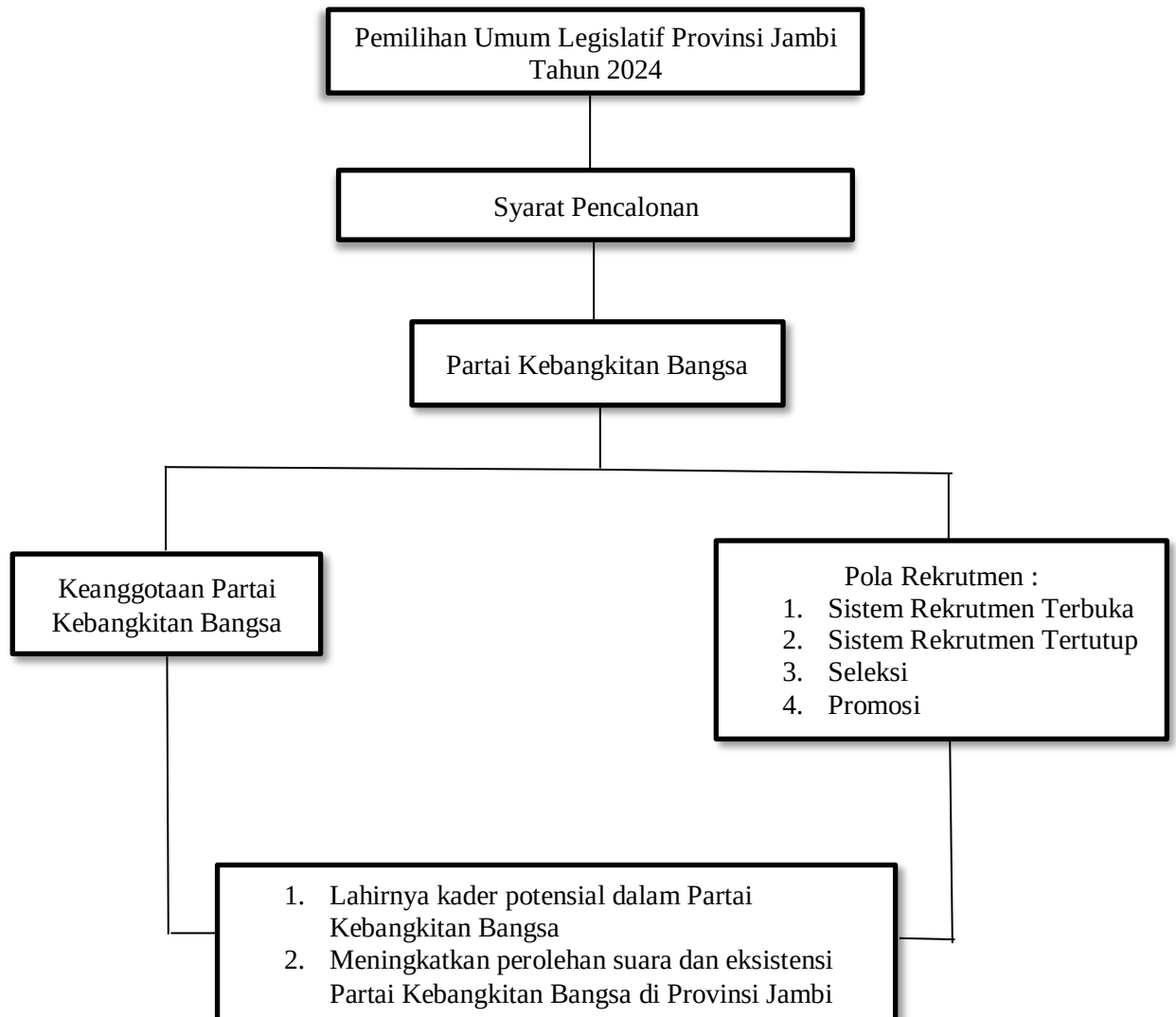
pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

b. Konsolidasi Internal

Konsolidasi internal merupakan usaha untuk memperkuat struktur dan kekuatan di dalam lingkup internal partai. Biasanya, konsolidasi internal dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menyelesaikan konflik atau ketegangan yang mungkin terjadi di dalam partai, serta sebagai momentum untuk memperkuat upaya mencapai tujuan tertentu.

## 1.6 Kerangka Pikir

**Gambar 1.1**





## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini, pendekatan yang digunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti literatur, dokumentasi, atau wawancara dengan narasumber utama. Metode analisis melibatkan pemahaman dan penyelidikan terhadap hubungan antara konsep, kebijakan, dan temuan lapangan yang ditemukan selama penelitian dilakukan.<sup>21</sup>

### **1.7.2 Lokasi /Objek Penelitian**

Tempat penelitian ini berlokasi di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih untuk mengungkap kondisi aktual dan memperoleh data serta informasi dari objek yang menjadi fokus penelitian.

### **1.7.3 Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, menetapkan fokus penelitian sangat penting karena membantu mengarahkan perhatian pada masalah-masalah yang akan diteliti. Penentuan fokus penelitian biasanya didasarkan pada kebutuhan akan informasi baru yang akan diperoleh dari situasi sosial yang diteliti di lapangan. Fokus penelitian menentukan pilihan masalah yang akan diteliti dan bagaimana cara untuk memusatkan perhatian pada masalah tersebut. Oleh karena itu, peneliti

---

<sup>21</sup> Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif( Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN, 2020).

akan memusatkan penelitiannya pada bagaimana “Analisis strategi”.

#### **1.7.4 Sumber Data Penelitian**

##### **a. Sumber Data Utama (Primer)**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui proses pengumpulan data. Dalam hal ini, sumber data dapat diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek atau informan yang memiliki pengetahuan yang jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian ini akan melalui wawancara dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut kemudian akan dianalisis dan dijadikan sebagai data utama yang akan digunakan dalam menyelesaikan penelitian.

##### **b. Sumber Data Tambahan (Sekunder)**

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti melalui proses pengumpulan data, tetapi diperoleh melalui sumber lain seperti orang lain atau dokumen. Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung atau pelengkap data primer. Sumber data ini dapat berasal dari luar lapangan penelitian dan bersifat mendukung. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen kantor, buku, jurnal, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.

### 1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Berdasarkan teknik penentuan informan yang menggunakan purposive sampling, informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kemampuan mereka untuk memberikan informasi yang relevan dan mendalam tentang situasi atau kondisi latar belakang penelitian.<sup>22</sup> Misalnya, orang yang dianggap memiliki pengetahuan paling luas atau berada dalam posisi yang otoritatif sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini akan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tersebut.

**Tabel 1.2 Informan**

| No | Nama              | Jabatan                            |
|----|-------------------|------------------------------------|
| 1. | Elpisina, M.SI    | Ketua DPW PKB Provinsi Jambi       |
| 2. | Juwanda. S. Pd.i  | Sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi  |
| 3. | Ir. H. Erpan, M.E | Ketua DPC PKB Kabupaten Batanghari |

### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bisa menggunakan dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti, sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi langsung kepada

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2017).hal. 56

peneliti, contohnya melalui orang lain atau dokumen.<sup>23</sup>

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data telah memiliki pemahaman yang jelas tentang informasi yang ingin diperoleh. Oleh karena itu, saat melakukan wawancara, pengumpul data sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis atau bahkan alternatif jawaban untuk memudahkan proses pengumpulan data.<sup>24</sup> Peneliti melakukan proses wawancara dengan kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu yang cocok untuk melakukan sesi wawancara. Selama wawancara, peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen yang mencatat peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu tertentu. Teknik ini dimanfaatkan untuk mendapatkan data tertulis yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Sugiyono. hlm. 231

<sup>24</sup> Sugiyono. hlm. 244

<sup>25</sup> Sugiyono. hlm. 244

### 1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang tersistematis untuk menemukan, mengorganisir, dan menyajikan data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini membutuhkan kemampuan untuk mengorganisir data ke kategori-kategori yang cocok, sintesis informasi, pembentukan pola atau hubungan antar data, serta pemilihan informasi yang penting untuk dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk membuat kesimpulan yang mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain yang berkepentingan.<sup>26</sup> Metode interaktif dalam analisis data ditunjukkan melalui hal-hal berikut.<sup>27</sup>

#### a. Reduksi

Data dapat diartikan sebagai hasil dari suatu proses pemikiran yang memerlukan sensitivitas, kecerdasan, serta wawasan yang luas dan mendalam. Proses reduksi data, di sisi lain, merupakan langkah untuk memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan-catatan lapangan. Dalam proses ini, langkah-langkah seperti pengkodean, penyempurnaan, pengelompokan, mengarahkan, penghapusan informasi yang tidak relevan, dan pengorganisasian data dilakukan.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan

---

<sup>26</sup> Sugiyono. hlm. 241

<sup>27</sup> Sugiyono. hlm. 241

dan mengambil tindakan selanjutnya. Melalui penyajian data, peneliti dan pembaca dapat memahami apa yang sedang terjadi serta langkah yang harus diambil. Kecenderungan kognitif dalam penyajian data cenderung untuk menyederhanakan informasi kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Pola penyajian data ini dapat berupa matriks, jaringan, atau bagan yang mempermudah pemahaman terhadap informasi yang disajikan.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi.

Makna-makna yang muncul dari data harus diuji untuk memastikan kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya dengan konteks atau tujuan penelitian, ini disebut sebagai validasi data.

#### **1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi**

Triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan gabungan dari berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menguji keabsahan data tersebut dengan memeriksa kredibilitasnya melalui berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang berbeda.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Sugiyono. hlm. 241